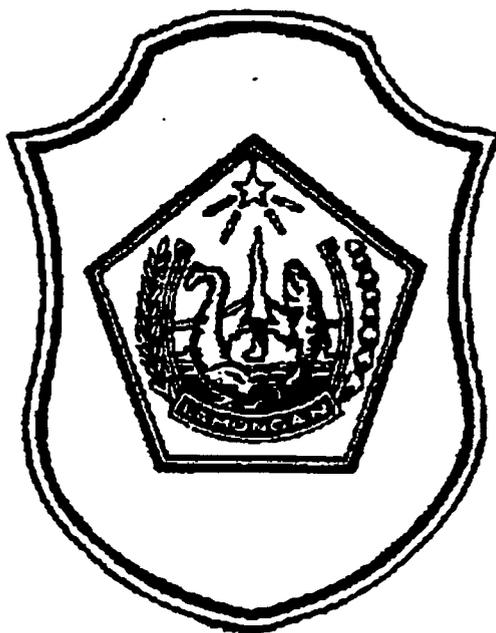


**PERATURAN DESA NGUJUNGREJO  
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)  
NGUJUNGREJO KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**



**Disusun Oleh :  
PEMERINTAH DESA NGUJUNGREJO**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN TURI  
DESA NGUJUNGREJO**

---

**PERATURAN DESA NGUJUNGREJO  
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGUJUNGREJO  
KECAMATAN TURI KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGUJUNGREJO**

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ngujungrejo Tahun Anggaran 2011 dalam Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2001 Nomor 35) ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 6/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 11/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 14/E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 15/E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Anggaran  
**Tentang** : Pendapatan dan Belanja Desa.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DESA NGUJUNGREJO TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGUJUNGREJO TAHUN ANGGARAN 2013.

#### **Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngujungrejo Tahun Anggaran 2013 Sejumlah Rp 426.785.360 (Empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah)

#### **Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp 426.785.360
b. Belanja	
1) Langsung	Rp 151.125.000.
2) Tidak Langsung	Rp 275.660.000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp 0
2) Pengeluaran	Rp 0

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

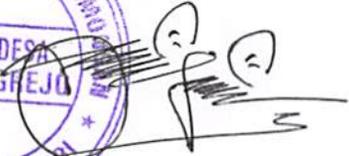
Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngujung Rejo  
Pada Tanggal 18 Pebruari 2013

**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**KECAMATAN TURI**  
**KEPALA DESA NGUJUNG REJO**



MAHMUDI S.Pdi

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA NGUJUNG REJO KECAMATAN TURI  
KABUPAEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGUJUNG KECAMATAN TURI  
NOMOR :188/ 01 /413. 302 .11 /2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA NGUJUNG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGUJUNG  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGUJUNG REJO**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Keuangan Desa, Maka dipandang perlu penetapan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Ngujung Rejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngujung Rejo Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Ngujung Rejo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

**Memperhatikan** ;Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Ngujung Rejo membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngujung Rejo Tahun Anggaran 2013.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** ;PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGUJUNG REJO TAHUN ANGGARAN 2013.

**Pasal 1**

**Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ngujung Rejo Tahun Anggaran 2013.**

**Pasal 2**

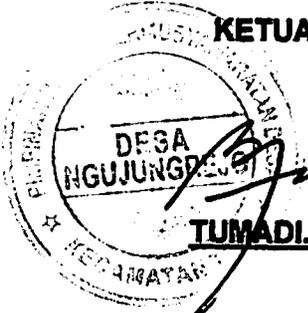
**Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan dan Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.**

**Pasal 3**

**Keputusan ini mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Ngujung Rejo  
Pada tanggal 18 fepruari 2013.**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGUJUNG REJO**

**KETUA**  
  
**TUMADI.ST**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA NGUJUNGREJO KECAMATAN TURI  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
NGUJUNGREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
NGUJUNGREJO KECAMATAN TURI  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027/01 /413. 302.11/2013

Pada hari ini senin, tanggal delapan belas bulan Pebruari Tahun Dua Ribu tiga Belas bertepatan di Balai Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Ngujungrejo perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngujungrejo Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Ngujungrejo mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan Usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Ngujungrejo Menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ngujungrejo Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngujungrejo Tahun Anggaran 2013 ini dibuat Sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**Badan Permasyarakatan Desa Ngujungrejo**  
Tanda Tangan

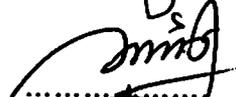
1. TUMADI ST.  
Ketua



2. H.NURAJI  
Anggota



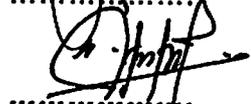
3. IMRON SHOLEH S.Pd.  
Anggota



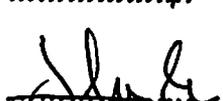
4. SLAMET. S.Ag  
Anggota



5. SAINURI S.Pdi.  
Anggota



6. ASTONO  
Anggota



7. SAIID  
Anggota

.....

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA NGUJUNGREJO KECAMATAN TURI  
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (RP)	TAHUN BERJALAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	0	2.500.000	
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha desa</b>	0	0	
<b>1.1.1.1</b>	<b>Hasil Koperasi Desa</b>	0	1.250.000	
<b>1.1.1.2</b>	<b>Hasil Usaha PKK</b>	0	0	
<b>1.1.1.3</b>	<b>Hasil Usaha BUMD</b>	0	1.250.000	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	75.200.000	75.200.000	
<b>1.1.2.1</b>	<b>Tanah Kas Desa</b>	75.200.000	75.200.000	
<b>1.1.2.1</b>	<b>Sewa Bengkok Kades</b>	22.000.000	22.000.000	
<b>1.1.2.2</b>	<b>Sewa Bengkok Perangkat Desa</b>	38.000.000	38.000.000	
<b>1.1.2.3</b>	<b>Sewa Eks Bengkok Perangkat PNS</b>	14.000.000	15.000.000	
<b>1.1.2.4</b>	<b>Sewa Tanah Desa Lainnya</b>	1.200.000	1.200.000	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	70.985.360	70.985.360	
<b>1.1.3.1</b>	<b>Swadaya Penunjang ADD dan Bansun</b>	5.000.000	5.000.000	
<b>1.1.3.2</b>	<b>Swadaya Penunjang Jalan Poros dan Plengsengan</b>	10.000.000	10.000.000	
<b>1.1.3.3</b>	<b>Swadaya Pembangunan Balai Desa</b>	2.000.000	2.000.000	
<b>1.1.3.4</b>	<b>Swadaya Sawah Tambak</b>	11.318.860	11.318.860	
<b>1.1.3.5</b>	<b>Swadaya KK</b>	10.975.000	10.975.000	
<b>1.1.3.6</b>	<b>Swadaya Masyarakat yang Lainnya</b>	31.691.500	31.691.500	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	10.000.000	10.000.000	
<b>1.1.4.1</b>	<b>Swadaya Gotong Royong Masyarakat Yang diuangkan</b>	10.000.000	10.000.000	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah</b>	6.600.000	6.850.000	
<b>1.1.5.1</b>	<b>Leges Surat Menyurat</b>	1.000.000	1.000.000	
<b>1.1.5.2</b>	<b>Leges Ijin keramaian</b>	1.500.000	1.500.000	
<b>1.1.5.3</b>	<b>Leges jual beli Tanah balik nama</b>	1.000.000	1.000.000	
<b>1.1.5.4</b>	<b>Leges NTCR</b>	1.000.000	1.250.000	
<b>1.1.5.5</b>	<b>Pungutan Pemilik Mobil pribadi</b>	75	75	
<b>1.1.5.6</b>	<b>Pungutan Pemilik mobil angkutan</b>	500	500	
<b>1.1.5.7</b>	<b>Pungutan pemilik toko besar / huler</b>	525	525	
<b>1.1.5.8</b>	<b>Leges jual beli Tanah tahunan</b>	500	500	
<b>1.1.5.9</b>	<b>Pungutan Perselisihan Batas Tanah</b>	500	500	
<b>1.2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	0	0	
<b>1.2.1</b>	<b>Bagi hasil Pajak kabupaten / kota</b>	0	0	
<b>1.2.2</b>	<b>Bagi hasil PBB ( 64,8 x 10 % ) x Baku</b>	0	0	
<b>1.3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>	0	0	
<b>1.4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	52.500.000	52.500.000	
<b>1.4.1</b>	<b>ADD</b>	41.500.000	41.500.000	
<b>1.4.2</b>	<b>Bansun</b>	11.000.000	11.000.000	
<b>1.5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota</b>	106.000.000	118.750.000	
<b>1.5.3.1</b>	<b>TPAPD Kades</b>	8.400.000	10.200.000	
<b>1.5.3.2</b>	<b>TPAPD Perangkat Desa</b>	54,8	62,4	
<b>1.5.3.3</b>	<b>TPAPD BPD</b>	2.800.000	3.650.000	
<b>1.5.3.4</b>	<b>Bantuan Pembangunan kantor / Balai Desa</b>	40.000.000	25.000.000	
<b>1.5.3.5</b>	<b>Purna Bakti Kepala Desa</b>	0	5.000.000	
<b>1.5.3.6</b>	<b>Purna bakti BPD</b>	0	1.500.000	
<b>1.5.3.7</b>	<b>Ansuransi Kepala Desa</b>	1.000.000	1.000.000	
<b>1.5.3.8</b>	<b>Bantuan Program E- KTP</b>	1.000.000	0	
<b>1.5.3.9</b>	<b>Bantuan Pemilihan Kepala Desa</b>	0	6.500.000	

1.5.3.10	Bantuan Pembentukan BPD	0	500
1.5.3.11	Bantuan RT	0	3.000.000
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	0	0
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0	0
	Hibah	50.000.000	60.000.000
1.6	Hibah dari Pemerintah	0	0
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Propinsi	0	0
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota	50.000.000	60.000.000
1.6.3	Jalan Poros Desa	50.000.000	60.000.000
1.6.4	Hibah dari Badan / Organisasi / Swasta	0	0
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan	0	0
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	30.000.000
1.7.1	Sumbangan untuk Pemilihan Kepala Desa	0	30.000.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>371.285.360</b>	<b>426.784.360</b>

1	2	3	4	5
	<b>2 BELANJA</b>			
	<b>2.1 Belanja Langsung (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3)</b>	<b>111.575.000</b>	<b>151.125.000</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai / Honorarium</b>	<b>9.575.000</b>	<b>48.425.000</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>Honorarium Pengurus LPM</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>	
<b>2.1.1.2</b>	<b>Honorarium Petugas Pemungut PBB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1.1.3</b>	<b>Honorarium 5 Ketua Rw</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	
<b>2.1.1.4</b>	<b>Honorarium 12 Ketua RT</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	
<b>2.1.1.5</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Desa</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>2.1.1.6</b>	<b>Tunjangan Kesejahteraan Sekertaris Desa</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	
<b>2.1.1.7</b>	<b>THR Perangkat Desa + Lembaga</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.550.000</b>	
<b>2.1.1.8</b>	<b>Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	
<b>2.1.1.9</b>	<b>Honorarium Ketua Limas</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>2.1.1.10</b>	<b>Tunjangan Purna Bakti LPM</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.1.1.11</b>	<b>Tunjangan purna bakti BPD</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	
<b>2.1.1.12</b>	<b>Tunjangan Purna Bakti Kepala Desa</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang / Jasa</b>	<b>102.000.000</b>	<b>102.700.000</b>	
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>2.1.2.1.1</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>2.1.2.1.2</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Sekdes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1.2.1.3</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Kasun, Kasi, Kaur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1.2.1.4</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas BPD</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>2.1.2.1.5</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas LPM</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>2.1.2.1.6</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Penggurus HOMPAM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1.2.1.7</b>	<b>Operasional LPM</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan / Material</b>	<b>99.000.000</b>	<b>99.000.000</b>	
<b>2.1.2.2.1</b>	<b>Belanja ATK</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>2.1.2.2.2</b>	<b>Pembelian Inventaris Kantor Desa</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>2.1.2.2.3</b>	<b>Pengadaan / Servis Komputer</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>2.1.2.2.4</b>	<b>Pembayaran Rekening Listrik</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>2.1.2.2.5</b>	<b>Pemeliharaan Motor Dinas roda 2</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	
<b>2.1.2.2.6</b>	<b>Belanja Bahan / Material ADD</b>	<b>29.050.000</b>	<b>29.050.000</b>	
<b>2.1.2.2.7</b>	<b>Belanja Bahan / Material Bansun</b>	<b>11.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	
<b>2.1.2.2.8</b>	<b>Belanja Material Jalan Poros Desa</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	
<b>2.1.2.2.9</b>	<b>Belanja Material Kantor / Balai Desa</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	
<b>2.1.2.2.10</b>	<b>Biaya Pensertifikatan tanah Kas Desa</b>	<b>16.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	
<b>2.1.2.2.11</b>	<b>Biaya Rapat Pemerintah Desa</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	
<b>2.1.2.2.12</b>	<b>Biaya Rapat BPD</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
<b>2.1.2.2.13</b>	<b>Biaya Rapat PD dengan intansi lain</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>2.1.2.2.14</b>	<b>Biaya Rapat LPM</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	
<b>2.1.3.1</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1.3.2</b>	<b>Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	
<b>2.2</b>	<b>Belanja tidak langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)</b>	<b>259.710.360</b>	<b>275.660.360</b>	
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai/ Penghasilan Kades</b>	<b>31.400.000</b>	<b>38.200.000</b>	
<b>2.2.1.1</b>	<b>Hasil Sewa bengkok Kades</b>	<b>22.000.000</b>	<b>22.000.000</b>	
<b>2.2.1.1.1</b>	<b>TPAPD Kades</b>	<b>8.400.000</b>	<b>10.200.000</b>	
<b>2.2.1.1.2</b>	<b>Ansuransi Kepala Desa</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	
<b>2.2.1.1.3</b>	<b>Purna Bakti Kepala Desa</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	
<b>2.2.1.2</b>	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	
<b>2.2.1.2.1</b>	<b>Tunjangan Kinerja Sekdes PNS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1.2.2</b>	<b>Hasil Sewa bengkok Sekdes PNS</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	
<b>2.2.1.2.3</b>	<b>TPAPD Sekdes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1.3</b>	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan tetap Kasun</b>	<b>27.200.000</b>	<b>29.600.000</b>	
<b>2.2.1.3.1</b>	<b>Penghasilan tetap Kepala Dasun</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	
<b>2.2.1.3.2</b>	<b>TPAPD Kasun</b>	<b>13.200.000</b>	<b>15.600.000</b>	
<b>2.2.1.3.3</b>	<b>Upah Punggut PBB</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.2.1.4</b>	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan tetap Kaur / Kasi</b>	<b>66.600.000</b>	<b>70.800.000</b>	
<b>2.2.1.4.1</b>	<b>Penghasilan Tetap Kaur / Kasi</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	
<b>2.2.1.4.2</b>	<b>TPAPD Kaur / Kasi</b>	<b>42.600.000</b>	<b>46.800.000</b>	
<b>2.2.1.5</b>	<b>Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap BPD</b>	<b>5.824.000</b>	<b>6.800.000</b>	
<b>2.2.1.5.1</b>	<b>Resentatip BPD</b>	<b>3.024.000</b>	<b>3.150.000</b>	

2.2.1.5.2	Tunjangan BPD	2.800.000	3.650.000
<b>2,2,2</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>90.000.000</b>	<b>85.000.000</b>
2.2.2.1	Jalan Poros Desa	50.000.000	60.000.000
2.2.2.2	Rehab Kantor / Balai Desa	40.000.000	25.000.000
<b>2,2,3</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	2.000.000	2.000.000
2.2.3.2	Lomba Desa	500.000	500.000
2.2.3.3	Kegiatan Posyandu	0	0
2.2.3.4	Kegiatan Bersih Desa / Ritual Desa	1.000.000	1.000.000
<b>2,2,4</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>11.500.000</b>	<b>14.500.000</b>
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	2.500.000	2.500.000
2.2.4.2	Operasional LPM	1.500.000	1.500.000
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000
2.2.4.5	Operasional PJOK /PJAK	3.000.000	3.000.000
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000
2.2.4.7	Operasional Koptan / Hippa	0	0
2.2.4.8	Operasional 12 RT	0	3.000.000
<b>2,2,5</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>9.686.360</b>	<b>13.260.000</b>
2.2.5.1	Keadaan Darurat	0	0
2.2.5.2	Bencana Alam	0	0
2.2.5.3	Pengeluaran Lain-lain	9.686.360	13.260.000
	Jumlah biaya ( 2.1+2.2)	371.285.360	426.785.360
<b>3,1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3,1,1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA)	0	0
	Tahun Sebelumnya	0	0
3,1,2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisah	0	0
3,1,3	Penerimaan Pinjaman	0	0
<b>3,2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3,2,1	Pembentukan Dana cadangan	0	0
3,2,2	Penyetoran Modal Desa	0	0
3,2,3	Pembayaran Hutang	0	0
	Jumlah Pembiayaan	0	0

